



Pengelolaan Risiko

DALAM PENGELOLAAN KATALOG ELEKTRONIK DAN PELAKSANAAN E-PURCHASING

Dr. Fahrurrazi, M.Si.



FASILITATOR

Nama : **Dr. H. FAHRURRAZI, A.Md.LLAJ., S.IP., S.H., M.Si., CPOF, CPSP, CCMS, CPST.**

TTL : Pontianak, 21 April 1980

Alamat : Puri Cibeureum Permai II, Jln. Flamboyan No. 7 Sukabumi

Pendidikan : S-3 Doktor Administrasi Pendidikan

Penugasan PBJ : 1. Instruktur / Trainer / Fasilitator / Narasumber PBJ
2. Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli PBJ
3. Asesor Kompetensi Ahli PBJ
4. Advisor Ahli PBJ
5. Mentor COE Modernisasi Pengadaan
6. Mediator dan Arbiter Pengadaan

Tugas lainnya : 1. Ketua DPD Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia
2. Dewan Pendiri Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia
3. Dosen MNC University dan Institut Manajemen Wiyata Indonesia

Email : erazeti@gmail.com

HP : 085624222715

Weblog : fahrurrazi.id





Pelaksanaan E-Purchasing **PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH**

Pelaksanaan e-purchasing menjadi keniscayaan sebagai metode pemilihan yang layak dipergunakan seiring dengan perkembangan informasi dan transaksi elektronik. Dalam fase-fase awal implementasinya, tidak menutup kemungkinan terdapat hal-hal yang masih menjadi potensi permasalahan, sehingga diperlukan penanganan atas permasalahan tersebut, termasuk dalam membangun **prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko berbasis identifikasi permasalahan**

Identifikasi Potensi **PERMASALAHAN**

Dalam perkembangan awal pelaksanaan e-purchasing, terdapat beberapa aspek yang dinilai dapat menjadi potensi permasalahan. Identifikasi permasalahan ini hendaknya dapat menjadi informasi dan data dukung dalam membangun prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko.



REGULASI



PASAR DAN SISTEM



PROSES KERJA SDM



KN DAN PMH

ASPEK REGULASI



ASPEK REGULASI

No.	Perihal	Catatan / Rekomendasi
1	Pengaturan yang tidak terlalu detail	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Di satu sisi ini menjadi sisi baik yang dapat membuat proses pengadaan tidak gampang dinyatakan salah dan dapat memacu inovasi yang tidak terlalu dibatasi, namun di sisi lain dapat menjadi celah bagi oknum tertentu untuk memanfaatkan kondisi tersebut. Termasuk menjadi kesulitan bagi pihak yang melakukan pemeriksaan untuk mengenakan klausul spesifik pertentangan peraturan atas tindakan yang dilakukan. <p>Rekomendasi:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Dapat didukung pedoman yang lebih spesifik untuk menjadi batasan pada ketentuan tertentu yang dapat menjadi celah perbedaan pemahaman, seperti pengaturan oleh Pimpinan K/L/Pemda dalam membangun prinsip kehati-hatian<input type="checkbox"/> Optimalisasi kompetensi pelaku pengadaan dan para pihak yang terkait<input type="checkbox"/> Dukungan justifikasi teknis dalam mengambil tindakan
2	Sinkronisasi pedoman pengawasan dengan perubahan proses bisnis	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Belum secara khusus tersedia pedoman pengawasan oleh APIP, baik untuk pelaksanaan reviu, audit, atau probity audit. <p>Rekomendasi:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Pedoman pengawasan Pengadaan perlu disesuaikan dengan perubahan proses bisnis katalog. Institusi APIP di K/L/Pemda dapat merumuskan pola pengawasan yang diterapkan sehubungan dengan perubahan proses bisnis katalog

ASPEK REGULASI

No.	Perihal	Catatan / Rekomendasi
3	Penegasan kewajiban e-purchasing	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Narasi regulasi masih meletakkan kewajiban e-purchasing dalam batasan kewajiban atas kondisi tertentu, sehingga belum dapat dilakukan secara serentak oleh K/L/PD. Rekomendasi: <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Pimpinan K/L/PD dapat mengatur lebih spesifik penerapan kewajiban e-purchasing pada seluruh atau sebagian komoditas, sebagai jika ada upaya massif penerapan e-purchasing.<input type="checkbox"/> Dukungan justifikasi teknis dalam mengambil tindakan
4	Penegasan kriteria pilihan produk	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Belum diatur secara spesifik standarisasi dari produk yang dapat ditayangkan di dalam katalog Rekomendasi: <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Pimpinan K/L/PD dapat mengatur lebih spesifik standar atau yang dapat distandarkan dari produk yang dapat ditayangkan di dalam katalog<input type="checkbox"/> Dukungan penelaahan / justifikasi teknis dalam mengambil tindakan

ASPEK REGULASI

No.	Perihal	Catatan / Rekomendasi
5	Sinkronisasi TKDN	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Belum sinkronnya antara penentuan nilai TKDN secara pedoman area Perindustrian, Pengadaan, dan Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga mempengaruhi skema proses e-purchasing Rekomendasi: <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Perlu diterbitkan pedoman yang lebih spesifik terkait sinkronisasi penentuan nilai TKDN oleh institusi terkait
6	Eksistensi Keputusan Kepala LKPP 122/2022 dan 177/2024	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Masih ditemukannya pemahaman Keputusan Kepala LKPP 122/2022 dan Keputusan Kepala LKPP 177/2024 merupakan pengaturan internal di LKPP, yang tidak mengatur secara keseluruhan bagi K/L/PD Rekomendasi: <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Optimalisasi sosialisasi regulasi
7	Penegasan kriteria metode pemilihan dalam e-purchasing	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Belum diatur secara spesifik kriteria pilihan antara negosiasi, mini kompetisi, dan comcat bagi PPK/PP dalam melakukan proses pemilihan e-purchasing Rekomendasi: <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Pimpinan K/L/PD dapat mengatur lebih spesifik kriteria metode pemilihan dalam e-purchasing<input type="checkbox"/> Dukungan justifikasi teknis dalam mengambil tindakan

KONDISI PASAR DAN SISTEM



KONDISI PASAR DAN SISTEM



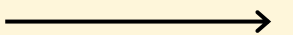
Permasalahan

Jumlah penyedia dan produk tayang yang masih sedikit atau indeks kompetisi yang masih kecil

1

Strategi Penanganan

1. Akselerasi ketersediaan penyedia di katalog
2. Jika masih jumlah masih sedikit, maka optimalkan referensi perbandingan, justifikasi pemilihan produk, penguatan negosiasi, atau gunakan skema mini kompetisi
3. Optimalisasi pengawasan/pendampingan APIP



KONDISI PASAR DAN SISTEM



Permasalahan

Belum diidentifikasi permasalahan pada Proses pengadaan yang memerlukan pemenuhan aspek input, proses, dan output, serta diperlukannya tuntutan tingkat layanan yang tinggi, seperti pada pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya

2

Strategi Penanganan

1. Perkuat kualitas dan justifikasi pencantuman barang/jasa di awal proses katalog
2. Dilakukan penjelasan pekerjaan dalam klarifikasi teknis.
3. Optimalkan pembuktian dalam catatan transaksi di sistem untuk mengikat dan menyepakati penyedia untuk bertanggungjawab atas kewajibannya
4. Penyajian narasi Surat Pesanan / Perjanjian yang lebih eksplisit dan mengakomodir banyak hal dalam kaitan pemenuhan input, proses, dan output.

KONDISI PASAR DAN SISTEM



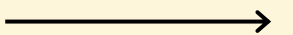
Permasalahan

Katalog dibuat karena terlambat menggunakan metode pemilihan yang lain, sehingga e-purchasing tidak ditempuh dari sebuah kesiapan awal proses pengelolaan katalog

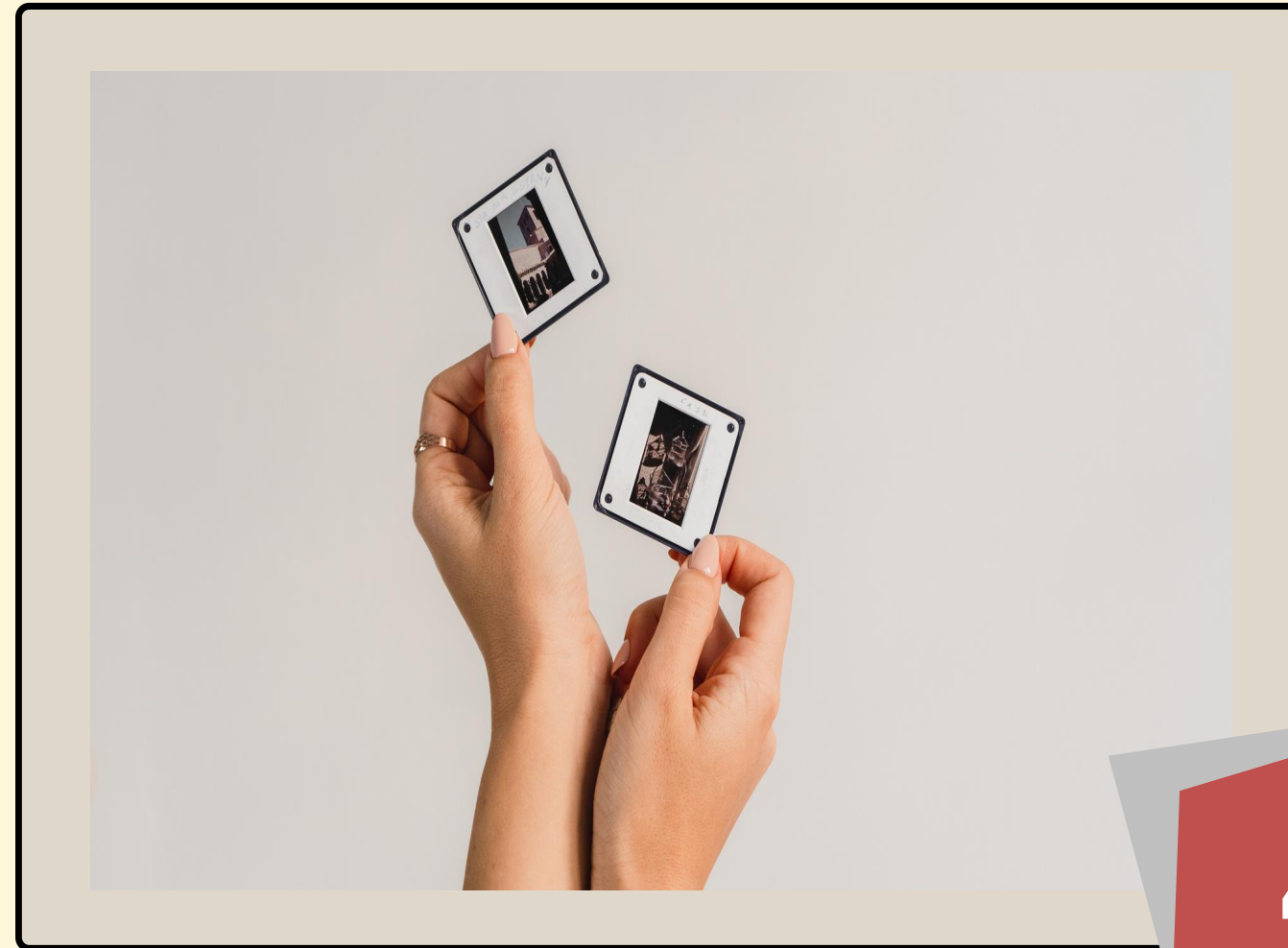
3

Strategi Penanganan

1. Perkuat kualitas dan justifikasi pencantuman barang/jasa di awal pengelolaan katalog
2. Penugasan terhadap APIP atau Pembentukan Unit khusus dalam tahapan awal pencantuman barang/jasa



KONDISI PASAR DAN SISTEM



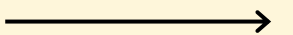
Permasalahan

Dugaan harga tinggi

4

Strategi Penanganan

1. Optimalisasi data dukung referensi harga
2. Optimalisasi justifikasi teknis pilihan produk
3. Optimalisasi kualitas negosiasi atau penggunaan mini kompetisi



KONDISI PASAR DAN SISTEM



Permasalahan

Euforia Katalog dan E-Purchasing yang tidak didukung penelahaan yang berkualitas

5

Strategi Penanganan

1. Membangun mindset motivasi untuk membuat katalog yang berkualitas
2. Perkuat kualitas dan justifikasi pencantuman barang/jasa di awal pengelolaan katalog
3. Penugasan terhadap APIP atau Pembentukan Unit khusus dalam tahapan awal pencantuman barang/jasa



PROSES KERJA SDM



Proses Kerja SDM

Pelaksanaan e-purchasing hanya pada PPK dan PP, dapat membuat proses tidak secara optimal dilaksanakan, terlebih ketika PPK dirangkap oleh PA/KPA, dan PP menggunakan personel dari instansi lain



Catatan / Rekomendasi:

1. Perlu dibentuk secara khusus penugasan pendampingan dalam tata Kelola e-purchasing pada sebuah SKPD, terlebih pada SKPD dengan jumlah paket yang besar dan/atau keterbatasan personel.
2. Tertib distribusi penugasan dalam penggunaan akun
3. Konsolidasi pengadaan
4. Dapat menjadi bahan pertimbangan LKPP/Pimpinan K/L/PD menyelaraskan regulasi terkait para pihak dalam e-purchasing

Proses Kerja SDM

Belum memahami perubahan proses bisnis pengelolaan katalog dan penyesuaian pada tata cara e-purchasing

Catatan / Rekomendasi:

1. Optimalisasi sosialisasi regulasi
2. Pendampingan UKPBJ dan/atau APIP



Proses Kerja SDM

Upaya pembentukan katalog dan pelaksanaan e-purchasing yang tidak terbuka, sehingga hanya menguntungkan pihak tertentu

Catatan / Rekomendasi:

1. Optimalisasi market sounding, market confirmation, dan vendor briefing
2. Pembuatan SOP kerja pengelolaan katalog
3. Optimalisasi Publikasi



Proses Kerja SDM

Kemampuan pelaku usaha dalam menyajikan informasi produk dan penggunaan sistem tayang katalog

Catatan / Rekomendasi:

1. Perlu dilakukan pendampingan terhadap pelaku usaha
2. Optimalisasi Monitoring dari pengelola katalog terhadap produk tayang di dalam katalog



Proses Kerja SDM

Tidak sinkronnya kontrak yang dipergunakan terhadap jenis dan karakteristik barang/jasa, dan pelaksanaan kontrak yang tidak sesuai dengan kontrak.

Catatan / Rekomendasi:

1. Surat Pesanan dapat ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja atau Surat Perjanjian.
2. Diperlukan pemetaan isi aktual sebelum dilakukan penyusunan rancangan kontrak, guna memetakan potensi permasalahan yang dapat mitigasi dengan klausul kontrak
3. Menerapkan fungsi check and recheck untuk memastikan rancangan kontrak reliabel dan tanpa kesalahan sebelum diserahkan ke proses pemilihan penyedia
4. Melaksanakan semua tahapan yang disebutkan di dalam kontrak, bila perlu Mengagendakan sesi bedah dan bahas kembali kontrak
5. Menugaskan personel pengelola kontrak dalam monitoring implementasi setiap tahapan dan klausul kontrak
6. Pelibatan pihak lain yang kompeten atas dinamika permasalahan yang tidak lazim atau tidak normal




Proses Kerja SDM

Pendokumentasian proses kerja yang belum optimal, sementara dalam pendekatan pemeriksaan sangat mengandalkan ketersediaan dokumentasi pendukung



Catatan / Rekomendasi:

1. Tertib administrasi di setiap proses kerja yang didukung dokumentasi yang reliabel, seperti berita acara, kertas kerja, dokumen tangkap layar, foto, dan video
2. Penugasan personel dalam pengendalian dokumentasi



KERUGIAN NEGARA DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM



KERUGIAN NEGARA DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM



Permasalahan

Persekongkolan dalam penayangan produk dan harga, seperti kecurangan penempatan produk, pengaturan harga sebelum pemilihan, dan ketidaksesuaian produk dengan penyajian informasi atribut

1

Strategi Penanganan

1. Optimalisasi kualitas market sounding
2. Percepatan dan memperbanyak penyedia dan produk tayang
3. Sosialisasi risiko hukum dalam pengadaan
4. Optimalisasi penyuluhan budaya anti korupsi secara khusus pada proses e-purchasing
5. Optimalisasi pengawasan APIP

KERUGIAN NEGARA DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM



Permasalahan

Potensi pungutan liar terhadap pelaku usaha dalam penayangan produk

2

Strategi Penanganan

1. Optimalisasi kualitas market sounding
2. Optimalisasi pemahaman peran dan tanggung jawab Pengelola Katalog
3. Optimalisasi penyuluhan budaya anti korupsi secara khusus pada pengelolaan katalog
4. Optimalisasi pengawasan APIP

KERUGIAN NEGARA DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM



Permasalahan

Hasil pengadaan tidak sesuai dengan kebutuhan, informasi dalam katalog, dan/atau aspek teknis

3

Strategi Penanganan

1. Optimalisasi klarifikasi teknis dan negosiasi dalam proses pemilihan
2. Optimalisasi pengendalian kontrak
3. Optimalisasi pengawasan APIP

KERUGIAN NEGARA DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM



Permasalahan

Intervensi, suap dan gratifikasi dalam pemilihan produk di dalam katalog

4

Strategi Penanganan

1. Optimalisasi justifikasi teknis pemilihan produk
2. Optimalisasi metode yang mendukung efisiensi
3. Pelibatan banyak pihak dalam kesepakatan pemilihan produk
4. Sosialisasi risiko hukum dalam pengadaan
5. Optimalisasi penyuluhan budaya anti korupsi secara khusus pada proses e-purchasing
6. Optimalisasi pengawasan APIP

MEMBANGUN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PENGELOLAAN RISIKO

PENGELOLAAN KATALOG DAN E-PURCHASING

LURUSKAN NIAT

Luruskan niat di awal untuk apa membangun katalog elektronik dan memilih metode e-purchasing jika tidak sejalan dengan target valu for money

KONTRIBUSI POSITIF

Dukungan pelaku pengadaan, pimpinan, dan segenap unsur lainpun wajib turut berkontribusi positif dalam perwujudan tujuan pengadaan melalui tata Kelola katalog elektronik dan tata cara e-purchasing

SISTEM PENGENDALIAN

Perlu upaya optimal pencegahan penyimpangan dan pembangunan sistem pengendalian, sehingga membatasi celah pelanggaran dalam pengadaan

Pengelolaan Risiko Dalam Pengadaan

Apakah mungkin kita menghilangkan semua risiko?

Tidak mungkin, bila kita ingin tetap melakukan pengadaan.

Risiko tidak mungkin sepenuhnya dihindari, dialihkan, atau bahkan dimitigasi, tetapi risiko perlu dikelola agar tetap berada pada batas yang masih bisa diterima.

Pengelola pengadaan dapat mengurangi dampak risiko melalui identifikasi, perencanaan dan pengelolaan risiko secara efektif.

Sehingga, sangatlah penting melakukan identifikasi dan pengelolaan risiko, untuk memitigasi dampak yang dapat ditimbulkan oleh risiko.

Jika Kita tidak mengelola risiko, **risiko akan mengelola Kita!**

RISIKO PADA PENGADAAN

Risiko pada pengadaan:

- **Dapat terjadi pada setiap tahapan**
- **Terdapat risiko** dengan tingkatan tertentu **dalam semua pengadaan**
- **Setiap pengadaan** memiliki **risiko yang berbeda** baik secara internal, eksternal, politik, strategis, ataupun operasional
- **Wujud risiko** bisa berbagai macam, antara lain:
 - Kerugian materiil atau finansial;
 - Kegagalan pengadaan, kegagalan operasi, kesulitan penggunaan
 - Tanggung jawab hukum
- **Tidak dapat diabaikan**, bahkan harus diperhatikan secara cermat apabila mengharapkan keberhasilan

Sehingga ...

Pengelola Pengadaan perlu memahami Risiko, terutama pada Pengadaan bersifat Kompleks dan Strategis

SIKAP TERHADAP RISIKO



Risk Avoidance (Menghindari)



Risk Reduction (Mengurangi)



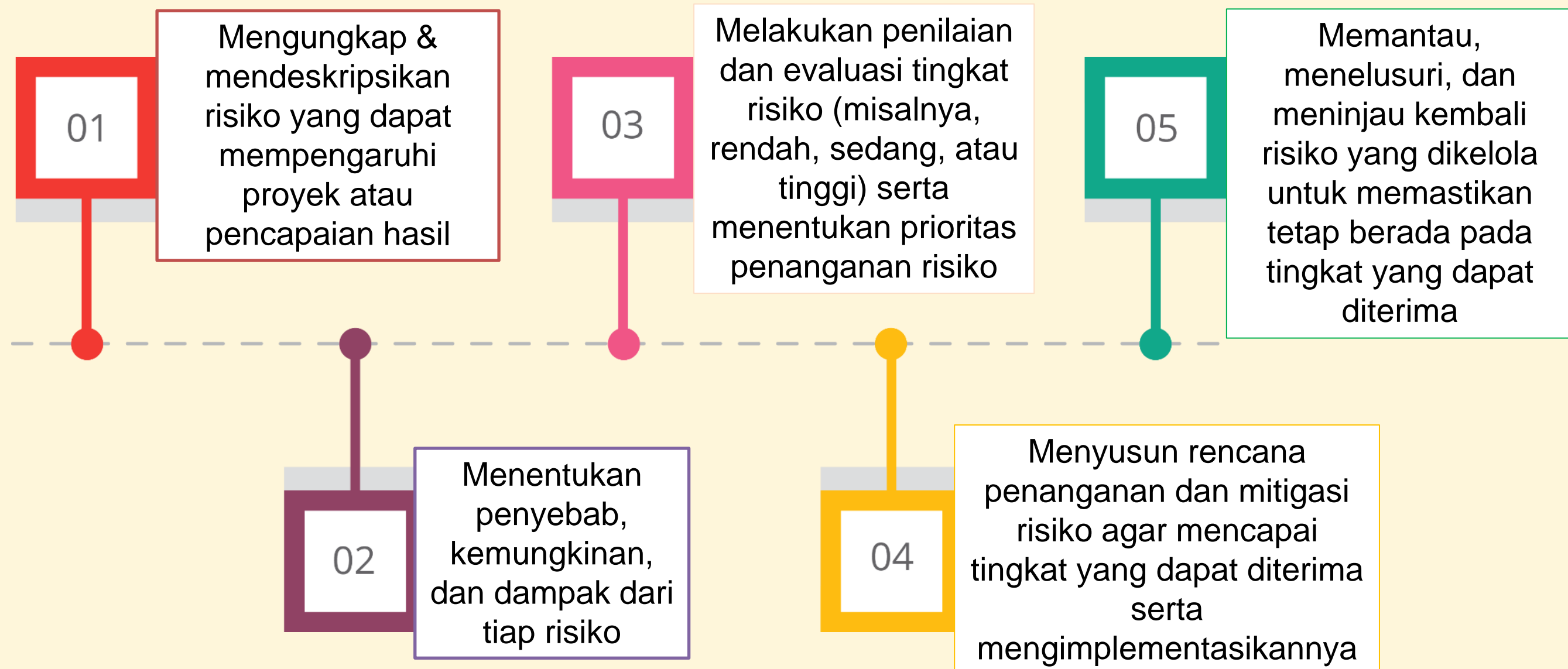
Risk Transfer (Memindahkan)



Risk Retention (Menerima)

Pengelolaan Risiko pada Pengadaan

Lima Langkah *Pengelolaan Risiko*?



CONTOH BENTUK RISIKO DALAM PENGADAAN



Hasil pengadaan tidak memenuhi kebutuhan, seperti barang tidak optimal berfungsi atau bahkan tidak dapat dipergunakan, kesulitan operasional atau penggunaan.

1

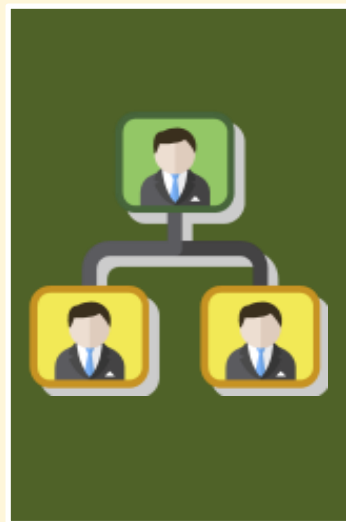
Kerugian materiil atau finansial atas pelaksanaan penyelenggaraan pengadaan, serta penggunaan sumber daya yang berlebihan

2

Permasalahan hukum dan pengenaan sanksi sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan

3

Risiko Permasalahan Hukum Dalam Pengadaan



Cenderung menjadi risiko yang paling ditakuti di penyelenggaraan Pengadaan di Pemerintah



Cukup populer, karena terkait dengan penggunaan keuangan negara dan penyimpangan yang mudah ditelusuri



Diperlukan pemahaman yang baik atas kewenangan, tertib administrasi, dan membangun kolaborasi efektif

PROCURE AS WORSHIP

Ikhtiar **PENGADAAN**



PENGUASAAN KEWENANGAN



PELIBATAN PIHAK LAIN



TERTIB ADMINISTRASI

Sekian
TERIMA KASIH

FAHRURRAZI

085624222715

fahrurrazi.id

erazeti@gmail.com